

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia membutuhkan pekerjaan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Disisi lain, kesempatan untuk kerja di luar negeri masih terbuka dengan upah yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan upah yang diterima di negara asal. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri dengan jumlah yang besar (Wardani, 2017). Dengan adanya hal ini, menjadi alternatif bagi negara kita untuk mengurangi persoalan yang berkaitan dengan banyaknya ketenagakerjaan di dalam negeri. Selain itu, adanya kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia, di mana kemiskinan struktural ini merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh adanya ketimpangan dalam sistem sosial, ekonomi dan kebijakan pemerintah yang tidak adil dan tidak merata sehingga menciptakan keterbatasan bagi masyarakat dalam mengakses sumber daya khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah yang tertinggal. Kemiskinan struktural ini dapat dilihat dari ketimpangan dalam pembangunan antarwilayah. Seperti yang terjadi, selama bertahun-tahun pemerintah melakukan pembangunan lebih berpusat di bagian Indonesia barat, terutama di Pulau Jawa. Sementara wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan sebagian wilayah di Sulawesi dan Kalimantan mengalami ketertinggalan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dan lapangan pekerjaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat bahwa presentase penduduk miskin di Papua mencapai 26,03% dan di NTT sebesar 20,23%, jauh di atas angka kemiskinan nasional yang berkisar di angka 9,36% (BPS,2023).

Dengan adanya kondisi ini sehingga mendorong banyak masyarakat di daerah-daerah yang mengalami kemiskinan struktural untuk memilih jalur migrasi sebagai strategi bertahan hidup. Tidak sedikit masyarakat yang memilih menjadi PMI di negara-negara tetangga seperti di Malaysia khususnya bekerja di sektor informal seperti perkebunan,

rumah tangga, dan konstruksi. Adanya kemiskinan struktural di daerah asal, seperti rendahnya lapangan pekerjaan, ketimpangan pendidikan dan minimnya perlindungan terhadap petani dan buruh sehingga membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan selain merantau demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Selain itu, kebijakan upah minimum yang tidak proporsional juga memperkuat alasan masyarakat untuk bermigrasi. Pada tahun 2024, upah minimum di NTT hanya sebesar Rp 2.123.994, sedangkan di DKI Jakarta mencapai Rp 5.067.381 (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2024). Di sisi lain, menjadi buruh di Malaysia atau Singapura menawarkan penghasilan yang lebih tinggi, meskipun dengan risiko kerja yang berat dan tanpa jaminan sosial. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) di beberapa provinsi juga memperlihatkan bahwa hasil pertanian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup petani. NTP yang berada di bawah angka 100 menandakan bahwa pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya produksi (BPS, 2023).

Terdapat juga Program bantuan sosial yang seharusnya menjadi penopang warga miskin pun belum berjalan efektif. Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2022 menunjukkan adanya sekitar 10 juta data penerima bantuan yang tidak akurat. Akibatnya, masyarakat miskin yang seharusnya menjadi prioritas justru tidak menerima bantuan, sedangkan kelompok yang lebih mampu malah terdata sebagai penerima (Kemensos RI & BPK, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PMI) Pasal 1 ayat 2, Pekerja Migran Indonesia atau disebut juga dengan PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, 2017).

Banyak masyarakat yang memilih untuk bekerja di luar negeri karena masyarakat Indonesia memiliki budaya migrasi yang tinggi (Nasirin, 2020). Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap atau mencari penghidupan yang lebih baik di daerah tujuan. Tiap-tiap individu memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi, baik itu kebutuhan ekonomi, sosial dan psikologis. Ketika suatu kebutuhan itu itu tidak terpenuhi, maka terjadilah tekanan atau stress yang memutuskan untuk melakukan migrasi (Mahzuni dalam Nasirin, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LPPKN (Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara) tahun 2010 di Tawau, Malaysia, diketahui faktor yang mendorong PMI memilih bekerja di Malaysia adalah karena mudahnya dalam mencari pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, disamping faktor ekonomi, faktor lain seperti letak geografis yang strategis, kehadiran keluarga, kerabat, ingin mendapatkan pengalaman, ataupun atas dorongan teman serta keluarga untuk melakukan migrasi serta persamaan agama dan budaya. Faktor utama yang mendorong PMI melakukan migrasi ke Malaysia adalah karena tekanan atas kondisi pengangguran terbuka yang tinggi di Indonesia dan besarnya peluang lowongan pekerjaan yang tersedia di Malaysia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2024 sebesar 4,82% (BPS, 2024).

Pekerja Migran Indonesia dapat diartikan sebagai seorang yang memiliki identitas warga negara Indonesia dan melakukan pekerjaan ke luar negeri atau luar wilayah Indonesia. Dari data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menunjukkan penempatan Pekerja Migran Indonesia periode Juli 2024 sebanyak 22.346 yang berkonsentrasi di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang dan Singapura dengan jumlah penempatan sebanyak 19.537 (87,43%) dari seluruh penempatan. Berdasarkan data penempatan dari periode Januari-Juli 2024, negara-negara bagian Asia tetap menjadi negara tujuan utama penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI, 2024).

Dari data Bank Indonesia (BI), Malaysia menjadi negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2021. Terdapat sekitar 1,62 juta orang atau 50,03% dari total PMI yang berada di Malaysia. Selain menjadi salah satu negara yang menjadi tujuan PMI, Malaysia juga merupakan negara dengan jumlah pengaduan PMI terbanyak sepanjang tahun 2021. Pada awal Januari 2022, telah muncul 64 pengaduan baru. Setelah Malaysia, Arab Saudi merupakan negara tujuan terpopuler yang menampung sekitar 833.000 Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2021, yang kemudian diikuti oleh Taiwan, Hongkong, dan Singapura (Rahman, 2022).

Upah PMI di Malaysia bervariasi tergantung pada sektor pekerjaan, pengalaman, dan kesepakatan antara pekerja dan majikan. Berikut adalah informasi mengenai upah di beberapa sektor:

1. Sektor Domestik (Pekerja Rumah Tangga):

Pada 1 April 2022, Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang menetapkan upah minimum bagi PMI sektor domestik sebesar 1.500 Ringgit Malaysia (RM) per bulan, setara dengan sekitar Rp 5,2 juta (Karunia, Sukmana, 2022).

MoU antara Indonesia dan Malaysia tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran ditandatangani pada bulan Mei 2011 sebagai hasil dari negosiasi dari MoU sebelumnya pada tahun 2006. MoU 2006 dinilai lemah karena membolehkan majikan memegang paspor pekerja, tidak ada jaminan hari libur, pengaruh besar agen, serta tidak jelasnya soal aturan terkait gaji. Pada MoU 2011 memperbaiki beberapa hal, seperti memberi hal PRT migran untuk memegang paspor sendiri, mendapatkan hari libur, dan menerima gaji lewat transfer bank. Namun, dalam praktiknya, MoU ini tidak dijalankan dengan konsisten. Tim evaluasi gabungan yang seharusnya memantau pelaksanaannya juga tidak bekerja dengan maksimal sehingga masa berlaku MoU berakhir pada tahun 2016. Sesuai dengan UU No.18 Tahun 2017, penempatan PRT migran hanya boleh dilakukan jika ada perjanjian bilateral. Maka, pembaruan MoU menjadi hal yang mendesak. Substansi MoU yang baru harus menegaskan hak-hak PRT migran, seperti hak atas libur, komunikasi, gaji yang layak, dan bebas dari biaya penempatan (Karunia & Sukmana, 2022).

2. Sektor Konstruksi:

Pekerja Migran Indonesia di sektor konstruksi di Malaysia dapat menerima upah harian antara RM 130 hingga RM 150, atau sekitar Rp 468.000 hingga Rp 540.000 per hari (Setyorini, 2024).

3. Sektor Lainnya:

Upah di sektor lain, seperti manufaktur atau perkebunan, bervariasi berdasarkan jenis pekerjaan, lokasi, dan pengalaman pekerja. Namun, secara umum, upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Malaysia adalah RM 1.500 per bulan.

Selain gaji pokok, PMI juga dapat menerima tunjangan dan fasilitas lain, seperti tunjangan kesehatan, transportasi, dan akomodasi, tergantung pada kesepakatan dengan pemberi kerja. Penting bagi calon PMI untuk memastikan bahwa mereka bekerja melalui

jalur resmi dan memahami hak serta kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku di Malaysia.

Pada lingkungan sebuah keluarga akan terlihat harmonis ketika dikelola dengan baik, sehingga mewujudkan keluarga bahagia dan rukun yang dibentuk atas dasar kerjasama serta keadilan. Keluarga yang mampu mengelola pendapat dan persepsi dengan berbagai pandangan yang berbeda tanpa melihat adanya perbedaan gender. Pembagian peran dalam sebuah keluarga merupakan salah satu aspek penting yang akan memengaruhi kesejahteraan keluarga. Pada masyarakat modern, peran-peran tradisional yang awalnya banyak didominasi oleh kaum perempuan seperti mengurus rumah tangga, menjaga dan mendidik anak, sedangkan laki-laki bertugas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mulai mengalami pergeseran seiring dengan berjalannya waktu. Adanya perubahan ini didorong oleh beberapa faktor, seperti perempuan yang mulai masuk dalam dunia kerja, meningkatnya kesadaran tentang kesetaraan gender, faktor ekonomi dalam keluarga yang kemudian mendorong masyarakat dalam mengubah pandangan terhadap pembagian peran dalam sebuah keluarga. Pembagian peran dalam keluarga melibatkan berbagai tanggung jawab dan tugas yang diatur berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan situasi dari masing-masing anggota keluarga.

Laki-laki di Indonesia umumnya bekerja di sektor publik dan perempuan di sektor domestik. Hal ini berarti bahwa, dalam pekerjaan rumah tangga termasuk mendidik anak, dibebankan pada seorang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakadilan dalam pembagian kerja dan hanya menguntungkan pihak laki-laki. Sedangkan perempuan harus menerima pekerjaan yang tidak mendatangkan materi. Kalaupun harus bekerja, perempuan harus memiliki gaji lebih kecil dan jabatan yang lebih rendah dari laki-laki (Budiman dalam Elia, 2000). Pada saat sudah berkeluarga, kehidupan perempuan berputar hanya sekitar kehidupan rumah tangga dengan tujuan menikah dan membentuk keluarga. Setelah menikah, hampir seluruh kehidupan perempuan dilewatkan dalam rumah tangga. Sehingga, perempuan lebih menjadi lebih tergantung kepada laki-laki, karena pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan sama sekali tidak mendapatkan gaji (Budiman, 1984).

Di Indonesia, sering ditemukan banyak perempuan yang diperlakukan secara tidak adil dalam lingkungan masyarakat yang menganut budaya patriarki. Adanya

pandangan bahwa perempuan tidak memiliki kekuatan dan berada di bawah laki-laki baik itu dalam aspek pendidikan, politik, lingkungan pekerjaan dan pengambilan keputusan (Zuhri et al., 2022). Pada keluarga yang menganut budaya patriarki, pembagian peran gender terlihat dengan jelas. Laki-laki sering dianggap sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab dalam mencari nafkah serta sebagai pengambil keputusan dalam rumah tangga. Sedangkan perempuan, umumnya menjalankan perannya mengurus rumah tangga, seperti memasak, menjaga anak dan pekerjaan domestik lainnya. Disisi lain, terdapat juga perempuan yang memiliki pekerjaan di luar rumah, namun tanggung jawab utama untuk urusan rumah tangga tetap menjadi bagian dari beban perempuan. Budaya patriarki masih bertahan hingga saat ini karena terdapat norma sosial serta tradisi yang telah ada sejak lama yang kemudian masih diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga masyarakat tetap mempunyai pandangan bahwa peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan bertugas mengurus rumah tangga menjadi hal yang alami dan tidak perlu diubah. Sebagian besar PMI perempuan yang berasal dari keluarga kelas bawah dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah karena keterbatasan akses ekonomi dan pendidikan, sehingga pekerjaan yang seadanya hanya dengan hanya menggunakan fisik menjadi satu-satunya pilihan untuk mendapatkan penghasilan, meski harus menghadapi resiko tinggi.

Pada keluarga PMI, pembagian peran gender berbeda dengan pembagian peran gender di Indonesia. Budaya patriarki mulai memudar, karena dalam keluarga PMI perempuan tidak hanya mengambil peran di bidang domestik namun juga ikut berperan dalam bidang publik, begitu juga dengan sebaliknya. Pembagian peran gender dalam keluarga PMI mulai mengalami pergeseran, yang awalnya pada saat berada di kampung asal menganut budaya patriarki, ketika berada di perantauan budaya patriarki tersebut mulai memudar. Salah satu faktor pendorong yang membuat perempuan ikut mencari nafkah adalah faktor ekonomi, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Perempuan yang bekerja di bidang publik mengharuskan mereka untuk meninggalkan rumah sehingga membuat mereka tidak bisa mengerjakan pekerjaan domestik sepenuhnya (Noorahayu et al., 2023). Sehingga dalam keluarga PMI biasanya sudah tidak lagi menganut budaya patriarki, melainkan terdapat pembagian peran domestik yang lebih fleksibel dalam mengurus rumah tangga.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, terjadinya interaksi yang menyebabkan perubahan yang cukup dinamis bagi kehidupan. Adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan serta adanya globalisasi yang mendorong terjadinya perubahan pada pasar tenaga kerja yang semakin kompleks. Sehingga, dengan adanya perubahan ini, memiliki dampak terhadap partisipasi perempuan dalam menjalankan perannya. Pada saat ini, peran dari perempuan semakin mengalami perubahan dari peran domestik yang terbatas, menuju peran publik yang semakin luas (Widyasari & Suyanto, 2023).

Alasan utama masyarakat memilih untuk merantau ke Sabah adalah kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga karena kondisi ekonomi di kampung halaman yang tidak mendukung. Sehingga mendorong mereka untuk merantau dan memilih untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di Sabah walaupun banyak migran yang memilih jalur ilegal atau jalur yang tidak resmi untuk bekerja di Sabah. Disamping itu, Sabah dipilih oleh PMI karena memiliki kesamaan bahasa, budaya, dan secara geografis dekat dengan Indonesia. Sehingga akan mempercepat proses adaptasi bagi migran dari Indonesia (Yuvanti, 2021).

Dalam keluarga pekerja migran terjadi pembagian peran yang lebih fleksibel, istri tidak hanya berada di rumah namun, ikut berperan dalam bidang publik untuk membantu perekonomian keluarga. Begitu juga dengan sebaliknya, laki-laki tidak hanya berperan dalam sektor publik tetapi juga ikut membantu melakukan pekerjaan di sektor domestik. Seperti di beberapa daerah pedalaman (Tawau, Merotai, Kunak, Lahad Datu dan daerah sekitarnya) baik itu laki-laki dan perempuan, keduanya bekerja sebagai buruh kelapa sawit, laki-laki bertugas menombak (memanen buah kelapa sawit), meloding buah kelapa sawit (mengangkat buah kelapa sawit menggunakan alat khusus) sedangkan buruh perempuan bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah jatuh lalu dimasukkan kedalam karung yang kemudian dipindahkan kedalam gerobak untuk dibawa ke pabrik dan kemudian akan ditimbang.

Berbeda dengan daerah disekitar kota (Kota Kinabalu, Keningau, Tenom dan sekitarnya) mayoritas berprofesi sebagai buruh pabrik, bekerja di bengkel motor sebagai montir/mekanik, Pekerja Rumah Tangga (PRT), petani sayuran dan pedagang sayur keliling. Bahkan sebagian istri mempunyai pekerjaan lebih dari satu (berprofesi lebih dari satu). Dalam hal ini, mempunyai profesi lebih dari satu menjadi salah satu upaya PMI

agar dapat bertahan hidup. Pada pagi hari, akan bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Selanjutnya, sore hari akan melanjutkan pekerjaan sebagai petani dan pedagang sayur keliling. Terdapat juga sebagian istri yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di rumah yang berbeda, sesuai dengan kesepakatan antara majikan dan pekerja. Dalam hal ini, istri bekerja sebagai PRT dengan konsep live out, dimana mereka tidak tinggal bersama majikan, namun tinggal bersama keluarga.

Sebagai contoh, istri akan berangkat bekerja dari rumah pertama setiap pagi. Setelah jam kerja dan pekerjaan di rumah tersebut selesai, maka akan berpindah ke rumah lainnya. Disamping itu, meskipun memiliki pekerjaan lebih dari satu, setiap istri tetap melaksanakan pekerjaan rumah selayaknya seorang ibu rumah tangga. Ketika pulang, akan lanjut untuk masak, mencuci baju dan melakukan pekerjaan yang lainnya. Meskipun sebagian pekerjaan dibantu oleh anak seperti menyapu rumah, melipat baju, dan beberapa pekerjaan lainnya tetapi tetap melaksanakan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga.

Para istri PMI di Kampung Masak memilih untuk menjalani lebih dari satu pekerjaan karena adanya tuntutan kebutuhan keluarga yang cukup besar. Mereka harus memikirkan biaya sekolah anak, belanja harian, hingga kebutuhan lainnya. Karena itu, banyak dari istri PMI yang memiliki pekerjaan lebih dari satu. Seperti pada pagi hari bekerja sebagai pekerja rumah tangga, lalu kemudian pada sore harinya akan bertani atau berjualan sayur. Semua dilakukan demi memastikan anak-anak tetap bisa sekolah dan dapat memenuhi kehidupan keluarga agar tetap terus berjalan.

Seperti yang terjadi di Kampung Masak, Keningau, merupakan salah satu kampung yang mayoritas penduduknya berasal dari PMI yang terdiri dari suku Bugis, Toraja, Flores, dan Jawa yang berprofesi sebagai buruh, kuli bangunan, petani sawah (profesi suami) selain itu, terdapat juga profesi lain seperti pekerja rumah tangga, petani sayur dan pedagang sayur keliling (profesi istri) bahkan sebagian memiliki pekerjaan lebih dari satu. Dengan adanya uraian fenomena di atas, sehingga peneliti melihat adanya pergeseran dalam pembagian peran gender dalam rumah tangga yang berbeda dengan pembagian peran di Indonesia. Dalam fenomena ini, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pembagian peran gender antara suami dan istri dalam rumah tangga keluarga PMI di Kampung Masak, Keningau, Sabah, Malaysia.

Penelitian ini tidak hanya penting secara akademik karena membahas tentang konstruksi sosial peran gender dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia, tetapi juga memiliki kedekatan emosional bagi peneliti. Sebagai seorang perempuan yang tumbuh dan tinggal di lingkungan masyarakat migran di Sabah, peneliti telah lama menyaksikan secara langsung bagaimana perjuangan keluarga PMI, terutama perempuan dalam menjalani berbagai peran demi keberlangsungan hidup keluarga setiap PMI. Pengalaman tersebut menumbuhkan rasa empati dan ketertarikan yang mendalam untuk memahami lebih jauh realitas sosial yang mereka hadapi. Dengan melakukan pengembangan penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sosial, khususnya kajian gender dan migrasi, sekaligus sebagai upaya untuk merekam dan menyuarakan pengalaman perempuan migran yang selama ini sering luput dari perhatian. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti mengambil judul **“Konstruksi Sosial Tentang Peran Gender Dalam Keluarga Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus di Kampung Masak, Keningau, Sabah, Malaysia)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana konstruksi sosial tentang pembagian peran gender dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia di Kampung Masak, Keningau, Sabah, Malaysia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana konstruksi sosial tentang pembagian peran gender dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia yang berada di Kampung Masak, Keningau, Sabah, Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini menggunakan teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan informasi bagi peneliti selanjutnya terutama dalam memahami tentang konstruksi sosial peran gender dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami konstruksi sosial yang membentuk peran gender dalam keluarga pekerja migran, yang dapat memperkuat kesadaran akan isu-isu gender dan mendorong keadilan sosial.
2. Pembuatan Kebijakan: Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik terhadap gender dan kebutuhan keluarga pekerja migran.